



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jalan Syekh Burhanuddin Nomor 145 Kota Pariaman, Telepon (0751) 91529

Pariaman, 21 Juni 2024

Nomor : 570/ 226 /DPMPTSP&Naker/VI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Dokumen GAP dan GAB

Yth. Kepala Bappeda Kota Pariaman
di
Pariaman

Menindaklanjuti rapat Pengarus Utamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada tanggal 07 Mei 2024 di Ruang Rapat Walikota Pariaman, maka bersama ini kami kirimkan Dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690818 199703 2

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Identifikasi Isu/Masalah Gender - Minimnya jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang sesuai klaster dan kebutuhan serta permintaan dari peserta pelatihan - Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan PBK
Langkah 2	Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab - Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker di Kota Pariaman maka pelatihan dilaksanakan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swata - Terbatasnya jumlah LPK Swasta yang telah terakreditasi dan mempunyai jurusan pelatihan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan - Terbatasnya kuota daya tampung peserta dan jenis pelatihan
Langkah 3	Kerangka Kerja Logis - <i>Impact</i> - Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pariaman - <i>Outcome</i> - Meningkatnya <i>skill</i> pencari kerja sesuai kompetensi di Kota Pariaman - <i>Output</i> - Meningkatnya jumlah pencari kerja yang telah dilatih sesuai kompetensi Rencana Aksi 1. Melakukan kerjasama dengan BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) dan BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas); 2. Menyebarluaskan informasi pelatihan berbasis kompetensi;
Langkah 4	Identifikasi Unit Pelaksana - Bidang Tenaga Kerja

No.	Pertanyaan	Hasil Reviu
1	Bagaimana gambaran Sub Kegiatan?	Program : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai/Mandiri Satuan : 1 Laporan Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terbaru Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	Apa kontribusi Sub Kegiatan ini terhadap Rencana Aksi Lima Tahun yang telah disusun?	Berdasarkan gambaran Sub Kegiatan yang telah dijelaskan pada butir 1, Sub Kegiatan ini berpotensi untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagai berikut. • <i>Impact</i> - Menurunnya angka pengangguran di Kota Pariaman • <i>Outcome</i> - Meningkatnya <i>skill</i> pencari kerja di Kota Pariaman • <i>Output</i> - Meningkatnya jumlah pencari kerja yang telah dilatih
3	Bagaimana kondisi Sub Kegiatan saat ini? Apakah sudah mengarusutamakan gender dari aspek: - Akses - Partisipasi - Kontrol - Manfaat	Saat ini sub Kegiatan sudah mengarusutamakan gender, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. - Akses : laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama - Partisipasi : peserta laki-laki dan perempuan pelaksanaan PBK bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi - Kontrol : kontrol kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi - Manfaat : penerima manfaat adalah peserta PBK / Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi

4	Apa faktor penyebab/ kendala belum mengarusutamakan gender? a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal	Penyebab Sub Kegiatan belum responsif gender: a. Faktor Internal - Jumlah pelatihan terbatas dan keterbatasan anggaran akibat refocusing b. Faktor Eksternal - Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan
5	Apa Rencana Aksi yang perlu dilakukan agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender?	Rencana aksi agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender: 1. Informasi responsif gender bagi pelaksana 2. Persiapan kerjasama pelatihan kerja dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kabupaten / Kota lain / BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) / BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas) 3. Pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kabupaten / Kota lain / BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) / BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas)

Pariaman, 21 Juni 2024
Penanggung Jawab Kegiatan



GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si
NIP. 196908181997032001

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
"GENDER ACTION BUDGET (GAB)"
SUB KEGIATAN TA 2025

Perangkat Daerah	:	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Program	:	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	:	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Kode Sub Kegiatan	:	2.07.03.2.01.0001
Kinerja	:	Tersedianya pencari kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan di Kota Pariaman
Indikator	:	Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai/Mandiri
Satuan	:	1 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- f. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender;
- g. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026.

2. Gambaran Umum

- Terjadinya peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebanyak 5,19% menjadi 5,68% di tahun 2023.
- Bertambahnya jumlah penduduk usia produktif yang mana pada tahun 2022 sebanyak 56.591 orang dari 96.719 orang penduduk menjadi 57.555 orang dari 97.206 orang penduduk pada tahun 2023.
- Upaya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja sehingga mampu mencetak Tenaga Kerja terampil / berwirausaha.
- Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan (TPTP) sebesar 2,50 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-Laki (TPTL) sebesar 8,05.
- Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan (TPTP) sebesar 2,81 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-Laki (TPTL) sebesar 7,07.
- Tidak adanya diskriminasi gender dalam penawaran peserta pelatihan, karena semua peserta telah melalui seleksi yang fair.
- Sub kegiatan belum responsif gender karena permasalahan utama terletak pada passion calon peserta pelatihan.

B. Penerima Manfaat

Pencari Kerja di Kota Pariaman

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

(1) **Metode Pelaksanaan** : Swakelola

(2) **Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Informasi responsif gender bagi pelaksana;
- Persiapan kerjasama pelatihan kerja dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kabupaten / Kota lain
- Pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kabupaten / Kota lain

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 Bulan (Januari s.d. Desember 2025)

E. Biaya yang Dikeluarkan
Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pariaman, 21 Juni 2024
Penanggung Jawab Kegiatan



GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si
NIP. 196908181997032001